



## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah)

Irma Angriani Banunaek<sup>1</sup>, Henny A. Manafe<sup>2</sup>, M.E. Perseveranda<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, [angriani\\_irma@yahoo.co.id](mailto:angriani_irma@yahoo.co.id)

<sup>2</sup> Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, [hennyunwira@gmail.com](mailto:hennyunwira@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, [perseverandaerse@gmail.com](mailto:perseverandaerse@gmail.com)

Corresponding Author: [angriani\\_irma@yahoo.co.id](mailto:angriani_irma@yahoo.co.id)

**Abstract:** *This article discusses a literature review of factors that have an impact on local government financial performance, namely local revenue, size of local government, and influence. Writing this article intends to determine the hypothesis that has an impact on each variable so that it can be useful for further writing. Writing this article will yield results if 1) Local Own Revenue has a positive or crucial impact on local government financial performance; 2) The size of the local government that influences positively or is crucial to the financial performance of the local government; 3) Leverage has a positive and crucial impact on local government financial performance; 4) Regional original income, size of local government, and leverage which simultaneously have a positive and crucial effect on local government financial performance.*

**Keyword:** *Regional Original Income, Local Government Size, Leverage.*

**Abstrak:** Artikel ini Membahas tentang suatu kajian pustaka faktor yang berdampak bagi kinerja keuangan pemerintah daerah, yakni pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, dan *leverage*. Penulisan artikel ini bermaksud untuk menentukan hipotesis yang berdampak pada masing-masing variabel supaya bisa bermanfaat bagi penulisan selanjutnya. Penulisan artikel ini memberi hasil bila 1) Pendapatan asli daerah berdampak positif maupun krusial bagi kinerja keuangan pemerintah daerah; 2) Ukuran pemerintah daerah mempengaruhi positif maupun krusial bagi kinerja keuangan pemerintah daerah; 3) Leverage berdampak positif maupun krusial bagi kinerja keuangan pemerintah daerah; 4) Pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, dan *leverage* mempengaruhi positif maupun krusial secara simultan bagi kinerja keuangan pemerintah daerah.

**Kata Kunci:** *Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage.*

## PENDAHULUAN

Selaku pihak yang bertanggung jawab dalam membangun dan menyediakan layanan masyarakat, pemerintah daerah diharuskan agar melaksanakan keterbukaan maupun pertanggungjawaban atas tata kelola keuangan demi menciptakan pemerintah yang bersih. Usaha nyata pemerintah daerah dalam menerapkan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan, yaitu dengan melaporkan kondisi keuangannya secara tepat waktu, serta tersusun berdasar pada standar akuntansi pemerintah yang sudah didapat secara umum sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Pada kerangka konseptual standar akuntansi, prinsip akuntansi salah satunya ialah mengungkapkan secara lengkap: laporan keuangan menyampaikan informasi lengkap yang bermanfaat untuk pengguna laporan di lembar muka laporan atau catatan laporan keuangan (CALK) (Syafitri, 2012).

Mengukur kinerja berperan sebagai unsur terpenting sebab akan memberi respons kembali terhadap perencanaan yang sudah diterapkan, menyampaikan bila peranan dari pengukuran kinerja mampu memperjelas perihal:

1. Pengevaluasian terkait pelaksanaan program.
2. Media perbandingan terhadap layanan yang tersedia.
3. Media komunikasi dengan khalayak luas. Tidak hanya itu, pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah diharuskan untuk terlaksana.

Mengingat realitas yang masih buruk terkait kinerja pemerintah daerah yang tampak melalui penjelasan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), jika keterbukaan maupun pertanggungjawaban pemerintah daerah tergelincir buruk, terkhusus mengenai penilaian kinerjanya. Sesuai pemaparan tersebut, mempertegas bila pengukuran kinerja keuangan daerah sebagai unsur terpenting yang patut terlaksana.

Kinerja keuangan menjadi pengukuran untuk memperjelas kapabilitas daerah selama menjalankan penerapan keuangan secara optimal demi menjaga pelayanan yang dikehendaki: penilaian lebih tinggi merupakan keharusan yang patut dilakukan supaya pihak eksternal bersedia untuk menanamkan modal ke daerah tersebut. Kinerja keuangan daerah merupakan unsur terpenting bagi pihak eksternal maupun bagi pihak pemerintah daerah itu sendiri. Kinerja keuangan daerah yang meningkat pun menjadi metode selama memaksimalkan rasio kemandirian di suatu pemerintahan. Penentuan kinerja bisa merepresentasikan kinerja pemerintah daerah bisa melalui penilaian kinerja keuangan (Sari, 2016).

Informasi pada laporan pertanggungjawaban atau laporan keuangan pemerintah daerah bisa berguna untuk dijadikan parameter pengukur capaian kerja keuangan pemerintah daerah (Junarwati *et al.*, 2013). Data penilaian kinerja keuangan berasal dari sumber keuangan yang terukur berdasar alokasi dana yang sudah dirancang, bisa berperan untuk meningkatkan program berikutnya untuk menciptakan layanan publik secara bermutu maupun maksimal (Sari, 2016). Pemerintah daerah berkewenangan memaksimalkan maupun memajukan wilayah sesuai alokasi dana atau pendapatan daerah selama memaksimalkan anggaran pendapatan belanja daerah.

Kesejahteraan suatu wilayah kerap beracuan melalui besaran nilai tambah yang diperoleh berwujud pendapatan pada wilayah itu. Nilai tambah yang tumbuh kembang secara positif mengarahkan pemodal agar bisa mengarahkan perbaikan di sektor infrastruktur daerah yang baik dan pemodal yang meningkat sehingga bisa memaksimalkan PAD maupun pendapatan antardaerah pun bisa memberi tambahan belanja modal pemerintah daerah itu (Simanullang, 2013). Halim (2013) menambahkan bila pengelolaan keuangan daerah secara terbuka, jujur, efektif, efisien, dan bertanggung jawab akan mempergunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio ini memperlihatkan kapabilitas keuangan pemerintah daerah selama mendanai segala program mereka secara mandiri, yang terukur melalui rasio pendapatan asli daerah (PAD) kepada jumlah bantuan pemerintah pusat maupun pinjaman. Dengan demikian, akan tahu perihal kapabilitas selama memperoleh sasaran pendapatan daerah.

Ukuran pemerintah daerah mampu dijadikan faktor penentu kinerja keuangan. Bila suatu wilayah berukuran besar, tentu masyarakat akan menutup adanya pertanggungjawaban yang kian membesar, maka bakal memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Ukuran pemerintah daerah ialah variabel besar kecil pemerintah daerah yang bisa terukur dengan total aset, jumlah karyawan, jumlah keseluruhan penghasilan, dan tingkat produktivitas. (Damanpour, 1991 dalam Sari, 2016) memaparkan bila ukuran pemerintah daerah terproksikan melalui total aset yang memengaruhi kinerja keuangan daerah.

Sesuai uraian yang sudah tersampaikan, rumusan permasalahan dalam artikel ini guna menentukan hipotesis seperti:

1. Apakah pendapatan asli daerah berdampak positif maupun krusial pada kinerja keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah ukuran pemerintah daerah berdampak positif maupun krusial pada kinerja keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah *leverage* memengaruhi positif maupun krusial bagi kinerja keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, dan *leverage* memengaruhi positif maupun krusial secara simultan bagi kinerja keuangan pemerintah daerah?

## KAJIAN PUSTAKA

### Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Bastian (2006: 274) menjabarkan bila kinerja sebagai penggambaran atas penerapan aktivitas, program, maupun kebijakan untuk memperoleh target maupun tujuan organisasi. Azhar (2008) menuturkan bila kinerja sebagai kegiatan yang terstruktur dari suatu unsur selama kurun waktu tertentu dan menjadi komponen dari pengukur kesuksesan dari pekerjaan yang sudah terlaksana. Hamzah (2007) menambahkan bila kinerja sebagai perolehan terhadap segala sesuatu yang terencana atas dasar rencana perseorangan atau organisasi. kinerja keuangan ialah penilaian kinerja dan berindikator keuangan. Halim (2012: 232) menambahkan bila kinerja keuangan daerah ialah pengukuran untuk mencermati kapabilitas perusahaan selama melaksanakan otonomi daerah. Sesuai penuturan itu, mempertegas bila kinerja keuangan pemerintah daerah ialah penggambaran atas perolehan target, program maupun kebijakan yang sudah terencanakan selama kurun waktu tertentu yang bisa terukur melalui indikator keuangan.

Pengukurna kerja ialah tahap untuk mengawasi secara berkala dan melaporkan perolehan dari suatu aktivitas, terkhusus perkembangan dari tujuan yang terencana (Westin, 1998 dalam Sumarjo, 2010). Pengukuran kinerja secara terus menerus dirasa mampu memberi umpan balik, maka akan muncul inisiatif untuk perbaikan secara berkelanjutan demi memperoleh tujuan di periode berikutnya (Bastian, 2006: 275). Pengukuran kinerja kepada organisasi bukan sekadar diberlakukan untuk organisasi yang terfokus ke upaya mendapat keuntungan, tetapi harus terlaksana ke organisasi nonkomersial pula. Perihal ini terlaksana supaya bisa menilai seberapa jauh pemerintah melaksanakan perannya dalam membangun dan melayani masyarakat melalui penyampaian laporan tanggung jawab keuangan (Sesotyaningtyas, 2012). Pengukuran kinerja dianggap memiliki peranan penting dalam menentukan pertanggungjawaban organisasi selama menciptakan layanan publik yang lebih baik. Pertanggungjawaban tidak menjadi kapabilitas untuk memperlihatkan cara dalam membelanjakan uang publik, namun membelanjakannya secara efektif maupun efisien (Mardiasmo, 2009: 121). Tentu saja masyarakat tidak bersedia untuk terus menyerahkan keuangan mereka (pungutan) bila layanan yang didapatkan masyarakat belum optimal dan tanpa menjamin kualitas.

Kajian Mandell (1997) dalam Sumarjo (2010) menyampaikan bila dengan mengukur kinerjanya, pemerintah daerah bisa mendapat informasi untuk memaksimalkan mutu dalam penentuan keputusan, maka bisa memaksimalkan layanan yang mereka berikan ke

masyarakat. Upaya untuk menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu mempergunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang sudah ditentukan maupun terlaksana. Halim (2012: 232) mengkaji rasio keuangan pada APBD melalui perbandingan antara hasil yang didapat dari satu periode, lalu membandingkannya dengan periode berikutnya agar bisa tahu kecenderungannya.

Rasio yang bisa mendapat pengembangan berdasar data keuangan dari APBD, sesuai penuturan Halim (2012: 232-241), yakni rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, aktivitas/kegiatan, *debt service coverage ratio* (DSCR) 19, dan rasio pertumbuhan.

### **Pendapatan Asli Daerah (X1)**

Sesuai UU Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah ialah sumber pendapatan daerah untuk mendanai pembangunan dan usaha daerah dalam meminimalkan tingkat kebergantungan dana dari pemerintah daerah. Kapabilitas daerah dalam mempergunakan pendapatan asli daerah bisa memengaruhi perkembangan daerah itu. Kian besar keterlibatan dalam pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan belanja daerah, berarti kinerja pemerintah dirasa kian membaik.

Melalui kajiannya, Sumarjo (2010) mempergunakan variabel kesejahteraan mempergunakan proksi pendapatan asli daerah dalam memperjelas kesejahteraan suatu wilayah. Pendapatan asli daerah yang tergolong tinggi bisa memberi indikasi bila pemerintahan itu mempunyai tingkat kesejahteraan lebih baik dibanding wilayah dengan pendapatan asli daerah yang minim. Tingkat kesejahteraan tentu bisa berimbas ke tingkat kinerja. Melalui pemberlakuan desentralisasi, maka memicu pemerintah daerah berkesempatan dalam mendayagunakan semua potensi demi mendapat PAD yang tinggi. PAD ialah semua perolehan daerah dari sumber ekonomi daerah.

Halim (2012: 96-98) menuturkan bila kelompok pendapatan asli daerah terpisah menjadi empat macam, seperti:

- a. Pajak daerah. Sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 terkait perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ialah iuran yang bersifat wajib bagi perseorangan atau lembaga/instansi ke daerah dengan tidak mendapat imbalan langsung secara setimpal, yang bersifat memaksa berdasar undang-undang, serta guna mendanai pelaksanaan pemerintah daerah maupun pembangunan daerah.
- b. Retribusi daerah sebagai pemungutan sejumlah uang dan merupakan wujud membayar jasa atau memberi perizinan tertentu yang pemerintah daerah sediakan untuk kepentingan perorangan maupun lembaga.

### **Ukuran Pemerintah Daerah (X2)**

Ukuran pemerintah daerah biasanya terlihat melalui total aktiva, serta bisa terlihat dari seberapa luas maupun jumlah penduduk di daerah itu. Kusumawardani (2012) mempertegas bila aktivitas operasional daerah lebih mudah terlaksana bila mempunyai ukuran pemerintah daerah yang besar. Perihal itu pun bisa memudahkan pemerintah daerah untuk melayani masyarakat secara layak. Efisiensi maupun efektivitas di sektor operasional pun bisa membantu dalam mendapat PAD demi memajukan suatu wilayah sebagai pembuktian atas meningkatnya kinerja di wilayahn itu. Ukuran besar bisa menunjang operasional pemerintah daerah yang disertai oleh peningkatan kinerja keuangan. Kondisi itu diakibatkan oleh tekanan besar dalam mengungkapkan laporan keuangan sehingga mengarahkan pemerintah daerah untuk mempunyai aktiva yang besar.

Ukuran pemerintah daerah dalam pembahasan ini ialah tekanan *coercive isomorphism*. Melalui ukuran pemerintah daerah yang besar, memberi indikasi bila pemerintah mempunyai aset yang sama besar, maka masyarakat dalam mengawasi aktivitas tata kelola pemerintah daerah kian ketat karena terdapat rasa khawatir tindakan penyimpangan atas dana yang

masyarakat percayakan kepada pemerintah daerah. Masyarakat yang mengawasi secara ketat memicu pemerintah daerah guna mengelola keuangan secara baik, transparan, dan bertanggung jawab, serta memaksimalkan kinerja keuangan secara menyeluruh, sekaligus mendapat pengakuan dari masyarakat terkait kinerja keuangan pemerintah daerah yang cukup baik

Kusumawardani (2012) menuturkan bila ukuran besar bisa menunjang operasional pemerintahan yang disertai oleh peningkatan kinerja keuangan. Kemudahan di sektor operasional itu bisa memperlancar pemerintah daerah untuk meraih pendapatan asli daerah demi memajukan wilayah sebagai wujud kinerja yang baik. Pemerintah daerah berukuran besar akan mempunyai tekanan besar dalam mengungkapkan kinerja keuangannya. Pemerintah daerah berkecenderungan menyampaikan segala sesuatu yang sifatnya berita baik terkait laporan kinerja, berita baik itu bisa berwujud laporan terkait kinerja pemerintah daerah yang tergolong baik sehingga bisa memicu peningkatan terhadap kinerja mereka (Sumarjo, 2010).

### **Leverage/Rasio Utang (X3)**

Kusumawardani (2012) memaparkan bila *leverage* sebagai perbandingan antara utang dan modal. Kian membesarnya *leverage* sehingga bisa meningkatkan tingkat kebergantungan pemerintah daerah itu ke pihak eksternal. Dengan begitu, kondisi itu cenderung memperlihatkan kinerja yang rendah. Di bidang publik, rasio utang berperan penting bagi kreditur maupun calon kreditur potensial dalam menentukan penyerahan kredit. Rasio ini hendak kreditur gunakan sebagai pengukur kapabilitas pemerintah daerah dalam membayarkan utangnya. Rasio ini turut memberi indikasi seberapa besar pemerintah daerah menanggung utang. Bila rasio ini tergolong tinggi, pemerintah daerah bisa saja memiliki utang berlebih dan perlu mencari upaya guna memangkas jumlah utangnya (Minarsih, 2015).

Penerapan rasio utang pada pemerintah daerah kedudukannya tidak sama seperti kondisi di suatu unit usaha. Hal itu diakibatkan oleh pendanaan eksternal pemerintah daerah bukan sekadar dari utang, melainkan melalui bantuan pemerintah pusat, yakni dana perimbangan. Pemerintah daerah dengan rasio utang besar memprediksi bila mereka mempunyai tingkat risiko yang sama besar. Perwitasari (2010) mempertegas bila pemerintah daerah dengan rasio utang tinggi, berarti kinerjanya tergolong buruk sebab sumber pendanaan utama diperoleh melalui pihak eksternal.

**Tabel 1: Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	NPGS Antari, IBP Sedana (2018)	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”	PAD dan belanja modal berdampak positif dan krusial bagi kinerja keuangan pemerintah daerah
	A Devita, A Delis, J Junaidi (2014)	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi”	Variabel PAD, dana alokasi umum dan jumlah penduduk berdampak positif maupun krusial bagi belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi
	A Tahar, M Zakhiya (2011)	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”	Variabel PAD maupun dana alokasi umum berdampak positif dan krusial bagi kemandirian daerah, serta pertumbuhan ekonomi daerah
	NN Fatimah, A Nopiyanti, D Mintoyuwono (2020)	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah”	PAD maupun dana perimbangan berdampak positif dan krusial bagi belanja daerah

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	N Sari, IK Mustanda (2019)	“Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dan belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”	Ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dan belanja modal berdampak positif maupun krusial bagi kinerja keuangan pemerintah daerah.
	IP Sari, R Agusti, R Rofika (2016)	“Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”	Ukuran pemerintah daerah, leverage, dana perimbangan maupun ukuran legislatif berdampak positif dan krusial bagi kinerja keuangan pemerintah daerah
	KAD Pratama, DNS Werastuti (2015)	“Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”	Kompleksitas pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, kekayaan daerah berdampak positif maupun krusial bagi laporan keuangan pemerintah daerah
	IGMAA Tama, PH Adi (2018)	“Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah, Ukuran Pemerintah, dan Temuan Audit terhadap Kinerja Keuangan Daerah”	Kriteria kepala daerah, ukuran pemerintah maupun temuan audit berdampak positif dan krusial bagi kinerja keuangan daerah.
	S Mulyani, H Wibowo (2017)	“Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”	Belanja modal, ukuran pemerintah daerah, intergovernmental revenue dan PAD berdampak positif maupun krusial bagi kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
	Y Alvini, YM Basri, MA Hassan (2018)	“Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah kepada Pemerintah Pusat dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”	Ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah berdampak positif dan krusial bagi pemerintah pusat maupun belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## METODE

Prosedur menuliskan artikel ini ialah mempergunakan prosedur kualitatif dan kajian pustaka. Menganalisis teori dan keterkaitan antarvariabel melalui buku maupun jurnal secara luring di perpustakaan maupun daring yang diperoleh melalui Mendeley, Scholar Google maupun media daring lain. Pada kajian kualitatif, maka kajian pustaka perlu dipergunakan secara konsisten dengan hipotesis metodologis. Dengan kata lain, perlu dipergunakan secara induktif agar tidak mengarahkan pertanyaan yang peneliti ajukan. Dasar penting dalam melangsungkan kajian kualitatif, yakni kajian itu sifatnya eksploratif, (Ali & Limakrisna, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### PAD Berdampak pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

UU Nomor 33 Tahun 2004 memperjelas bila PAD ialah satu dari beberapa sumber penghasilan pemerintah daerah dalam mengatur ketersediaan sumber daya dan aset lain. Namun, bila pemerintah daerah mempunyai pendapatan besar dan tidak didukung oleh kinerja efisien yang baik, tentu pemerintah daerah harus melakukan kajian kembali dan

mengevaluasi seluruh kesalahan yang mereka lakukan supaya di periode mendatang tidak mengalami kesalahan yang sama.

(Rioni & Saraswati, 2019) menyampaikan pendapat bila PAD mampu memengaruhi kinerja keuangan pemerintah. Sama seperti penuturan (Ayu, 2018), menyebut bila PAD pun mampu memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Keterkaitan antarvariabel, yakni bila kian tinggi PAD di tiap periode berjalan, berarti kinerja keuangan pemerintah tersebut pun dianggap berhasil sebab bisa mengoptimalkan pungutan dan pajak daerah. Lain bila PAD tergolong rendah, berarti pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi maupun meneliti kembali mengenai kinerja keuangan dari segi pendapatan daerah. Berdasar pada teori keagenan, menyebut bila pemerintah daerah selaku agen mendapat kewenangan dari masyarakat selaku prinsipal guna mengatur semua anggaran, termasuk penerimaan atau pengeluaran yang didapat melalui pajak, retribusi atau sumber daya lain untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat, misal membangun/memperbaiki sekolah, jembatan, dan sarana lain demi menyejahterakan masyarakat.

### **Ukuran Pemerintah Daerah Berdampak pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Ukuran pemerintah daerah mampu terproksikan ke total aktiva milik daerah, serta pemerintah daerah dengan ukuran aktiva besar diharuskan untuk berkinerja cukup baik dibanding daerah dengan ukuran aktiva kecil (Kusumawardani, 2012). Selama memberi layanan yang maksimal bagi masyarakat, pemerintah daerah harus mendapat dukungan dari ketersediaan aktiva. Pemerintah daerah dengan aktiva besar dianggap mampu memberi layanan yang sama baiknya, maka turut berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah daerah itu.

Masyarakat bakal menuntut instansi dengan ukuran besar agar berkenan mengungkapkan kewajibannya itu, serta tekanan itu cenderung berimbas ke tuntutan kinerja dari instansi itu (Sumarjo, 2010). Pemerintah daerah berukuran besar terkait aktivanya pun bakal diawasi dan diperhatikan secara serius oleh masyarakat terkait aktivitas dalam mengelola pemerintah daerah. Hal itu dilaksanakan karena masyarakat khawatir bila instansi atau organisasi akan bertindak menyimpang terkait pengelolaan aktiva. Pengawasan ketat dari masyarakat bakal berperan sebagai tekanan *coercive isomorphism* terhadap pemerintah daerah guna memaksimalkan kinerja keuangan mereka, termasuk mendapat pengakuan masyarakat bila pemerintah daerah bisa mengatur kekayaan daerah secara maksimal, mengingat kian tinggi tingkat pengawasan, berarti kian tinggi pertanggungjawaban maupun kesediaan seseorang untuk bekerja (Novianti *et al.*, 2016).

### **Leverage Berdampak ke Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

*Leverage* ialah perbandingan antara jumlah keseluruhan aktiva dan liabilitas yang ada di pemerintah daerah. Jika tingkat *leverage* tergolong rendah, berarti kinerja keuangan bisa dianggap baik. Lain jika *leverage* di suatu pemerintahan tergolong tinggi, berarti kinerja keuangannya dianggap buruk. Dengan begitu, pemerintah daerah perlu melakukan kajian kembali supaya utang ke pihak luar tidak bertambah dan mampu mengurangi jumlahnya (Ilmiyyah, Dewata, & sarikadarwati, 2017).

(Sumarjo, 2010) memaparkan bila *leverage* memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Keterkaitan antarvariabel, yakni bila jumlah keseluruhan aktiva di atas jumlah sehingga bisa memperjelas pemerintah daerah mampu mempergunakan aktiva mereka demi mendapat penghasilan daerah. Namun, bila jumlah keseluruhan liabilitas tinggi, berarti pemerintah daerah belum dianggap sukses dalam mengoptimalkan aktiva yang mereka miliki demi mendapat penghasilan daerah da sekadar mengandalkan liabilitas maupun kewajibannya kepada pihak eksternal. Sama seperti teori keagenan: pemerintah daerah terjadi kesulitan pendanaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, maka memicu pemerintah

daerah untuk mendapat tambahan dana dengan melakukan pinjaman atau berutang ke pihak eksternal.

Leverage berdampak positif maupun krusial bagi ketepatan waktu kinerja keuangan pemerintah daerah, yang sama seperti kajian milik IP Sari, R Agusti, R Rofika (2016), menyebut bila *leverage* memengaruhi krusial dan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **PAD, Ukuran Pemerintah Daerah maupun *Leverage* Berdampak pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pendapatan asli daerah (PAD) merepresentasikan perihal tingkat kemandirian di suatu pemerintahan selama mengatur maupun mengelola sistem pemerintahan mereka. Kian tinggi penerimaan PAD, memperjelas bila daerah itu bisa menjalankan sistem desentralisasi secara maksimal, serta mampu meminimalkan tingkat kebergantungan ke pemerintah pusat. Lain bila kian kecil perolehan PAD, maka daerah itu tidak bisa menjalankan sistem desentralisasi, maka tingkat kebergantungan pemerintah daerah ke pemerintah pusat cukup dibutuhkan agar bisa mencukupi kebutuhan daerah itu. Sumber PAD diperoleh melalui semua aset yang ada di daerah itu. Sebagai contoh, pajak, retribusi, tata kelola aset yang terpisah, dan sebagainya sebagai pendapatan sah. Paling tidak, melalui ketersediaan sumber aset daerah, pemerintah mampu mencukupi kebutuhan mereka tanpa meminta bantuan dari pemerintah pusat maupun pihak lain.

Pemerintah daerah bermaksud guna menjalankan program kerja, yakni memberi layanan maksimal untuk masyarakat. Supaya bisa memberi layanan tersebut, pemerintah daerah perlu mendapat dukungan dari ketersediaan aktiva. Atas dasar itulah, memerlukan sumber daya dan fasilitas yang layak untuk memberi layanan terbaik bagi masyarakat. Kian besar ukuran daerah, diperlihatkan melalui banyaknya aktiva di wilayah itu sehingga turut memicu peningkatan capaian kerja pemerintah daerah (Mustikarini dan Fitriyasi, 2012).

Sama seperti penjelasan Kusumawardani (2012), bila ukuran pemerintah daerah memengaruhi positif bagi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil kajian itu memberi simpulan bila ukuran pemerintah daerah sebagai aspek yang patut mendapat perhatian guna memaksimalkan kinerja keuangan. Kajian milik Mulyani dan Wibowo (2017), Saraswati dan Rioni (2019) maupun Sari dan Mustanda (2019) mendapati bila ukuran pemerintah daerah memengaruhi negatif bagi kinerja keuangan pemerintah daerah.

APBD ialah penyediaan dana untuk membangun dan melaksanakan segala kegiatan pemerintah daerah. Tetapi, ada waktunya pendapatan daerah tidak bisa mencukupi belanja daerah sehingga memicu kekurangan anggaran. Atas dasar itulah, pemerintah daerah membutuhkan dukungan sumber daya guna menyelesaikan masalah kekurangan itu. Sesuai Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, utang daerah bisa diperoleh melalui:

1. Pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, seperti pemodalan ataupun penerusan pinjaman dalam negeri/luar negeri.
2. Pemerintah daerah lainnya.
3. Lembaga keuangan perbankan berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia.
4. Lembaga keuangan bukan perbankan, seperti lembaga pendanaan berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia.
5. Masyarakat, yaitu obligasi daerah yang terbit dari penawaran umum ke masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Di sektor swasta, *leverage* kerap dipergunakan Fakhrudin (2008) memaparkan bila leverage ialah jumlah pinjaman untuk mendanai atau membeli aktiva perusahaan. Di akuntansi sektor publik, *leverage* ialah rasio pengukur besar kecil suatu wilayah bergantung ke pemerintah pusat dalam mendanai aktiva daerah. *Leverage* memperlihatkan perimbangan pendanaan daerah yang didanai oleh utang. Kajian milik Sumarjo (2010) mempertegas bila kian besar rasio utang di suatu pemerintahan, berarti kinerja keuangannya tergolong baik.



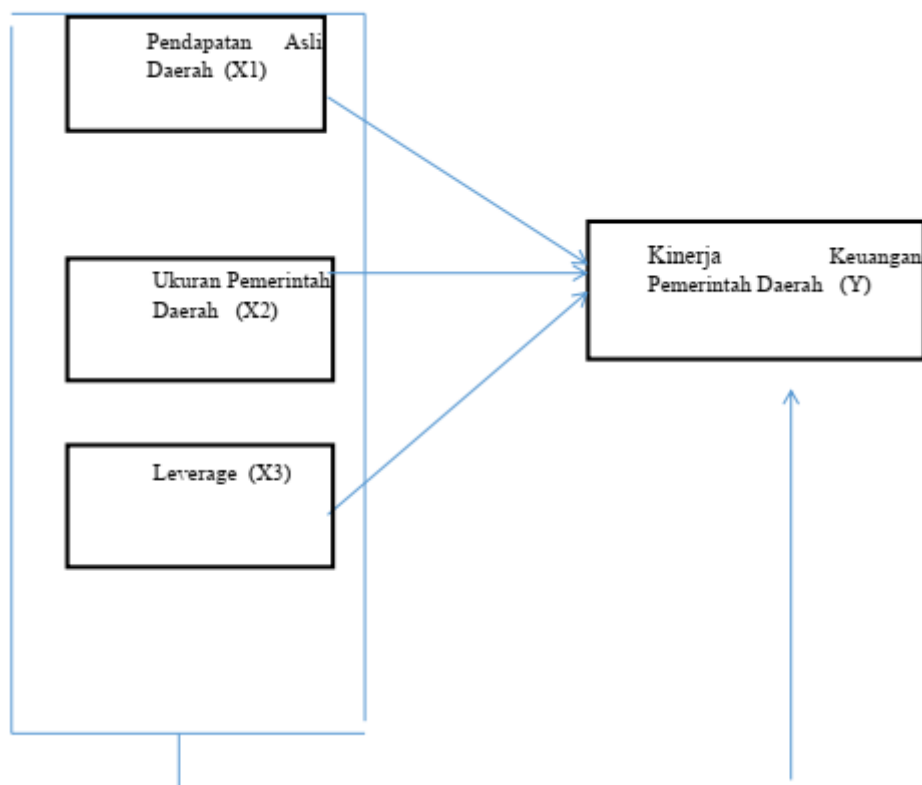
Pemerintah pusat selaku kreditur tetap mengawasi pemerintah daerah selama menjalankan kegiatannya. Melalui pengawasan ini, maka bisa mengarahkan pemerintah daerah agar memaksimalkan kinerja keuangan mereka supaya bisa meyakinkan pemerintah pusat bila dana yang mereka pinjamkan akan pemerintah daerah bayarkan. Kajian ini mempergunakan *debt to equity ratio* untuk menentukan rasio utang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2004 mempertegas bila kinerja sebagai hasil dari suatu aktivitas yang sudah diperoleh berdasar pada kehendak. Kinerja bisa terukur bila seseorang atau lembaga sudah menentukan prosedur terkait keberhasilan itu. Analisis keuangan cukup diperlukan oleh lembaga agar bisa mencermati perkembangan lembaga/organisasi itu. Melalui keberadaan analisis kinerja keuangan, maka bisa menentukan kinerja di masa silam dengan bermacam analisis, maka bisa mendapat laporan kedudukan keuangan yang merepresentasikan kenyataan maupun peluang kinerja di periode berikutnya.

Sesuai pemaparan tersebut, memperjelas bila PAD, ukuran pemerintah daerah maupun leverage berdampak positif maupun krusial bagi kinerja keuangan pemerintah daerah. Perihal ini sesuai kajian milik D. Saraswati (2019). Hasil kajian mempertegas jika variabel secara simultan PAD, ukuran pemerintah daerah dan leverage memengaruhi bermakna kepada kinerja keuangan pemerintah daerah. Kajian IP Sari (2016) mempertegas jikasecara simultan pePAD, ukuran pemerintah daerah maupun *leverage* berdampak positif maupun krusial bagi kinerja keuangan pemerintah daerah.

### Kerangka Pemikiran Teoretis

Sesuai uraian yang sudah tersampaikan, maka didapat kerangka berpikir seperti:



Berdasar kerangka pemikiran di atas, maka PAD, ukuran pemerintah daerah, dan *leverage* berpengaruh bagi kinerja keuangan pemerintah daerah, baik secara parsial maupun simultan. Selain variabel PAD, ukuran pemerintah daerah maupun *leverage* yang berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah masih terdapat variabel yang turut memengaruhinya, seperti akuntabilitas (X4), aksesibilitas (X5), pengelolaan keuangan daerah (X6)

## KESIMPULAN

Sesuai uraian yang sudah dilaksanakan, maka rumusan hipotesisnya ialah:

1. Pendapatan asli daerah berdampak positif maupun krusial pada kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Ukuran pemerintah daerah berdampak positif maupun krusial pada kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. *Leverage* berdampak positif maupun krusial pada kinerja keuangan pemerintah daerah
4. PAD, ukuran pemerintah daerah, dan *leverage* berdampak positif maupun krusial pada kinerja keuangan pemerintah daerah

## REFERENSI

- Alvini, Y. 2018. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah kepada Pemerintah Pusat dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Periode 2011-2016). *JOM FEB* 1(1): 1-15.
- Antari, N.P.G.S. dan I.B.P. Sedana. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud* 7(2): 1080- 1110.
- Aziz, A. 2016. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur). *EKSIS* 11(1): 87-101.
- Junarwati *et al.* 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2010-2012. Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* Vol. 6 No. 2: 186-193.
- Kusumawardani. 2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Semarang: Fakultas Ekonomi UNNES. ISSN 2252-6765.
- Maiyora, G. 2015. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera). *Jom FEKON* 2(2): 1-15.
- Mulyani, S. dan H. Wibowo. 2017. Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue* dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015). *Kompartemen* 15(1): 57-66.
- Mustikarini, W.A. dan D. Fitriyari. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. *Symposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*.
- Sari, I.P. 2016. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, *Leverage*, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatra). *Jom Fekom* 3(1): 679-692.
- Sari, N.M.D.P. dan I.K. Mustanda. 2019. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud* 8(8): 4759-4787.
- Sari. 2016. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pad, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatra). Faculty of Economics Riau University. Pekanbaru. *JOM Fekon* Vol 3 No 1.
- Sesotyaningtyas, Mirna. 2012. Pengaruh Leverage Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*. Volume. 1: Nomor. 1: 1-6
- Simanullang. 2013. Pengaruh Belanja Modal, Intergovernmental Revenue Dan Pendapatan

Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 – 2012. Fakultas Ekonomi – Jurusan Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang. Umrah Journal Of Accounting Volume 1, Nomor 1: 1-24